

KINERJA BUMDESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN KESETARAAN GENDER

NGURAH WISNU MURTHI

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tabanan

ngurah.wisnu88@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan Badan Usaha milik Desa (BUMDESA), peran BUMDESA terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif dan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tingkat eksplanasi deskriptif yaitu teknik analisis yang memaparkan data kualitatif berupa perkembangan BUMDESA, wujud peran BUMDESA dalam pengembangan ekonomi kreatif dan kesetaraan gender serta faktor yang mendorong maupun menghambat BUMDESA. Populasi penelitian ini adalah seluruh BUMDESA yang terdapat di objek wisata desa pesisir Kabupaten Badung, dengan menggunakan metode *convenience sampling*, maka yang menjadi sampel adalah 4 BUMDESA yang sudah berkembang dan 6 ekonomi kreatif di objek wisata desa pesisir Kabupaten Badung. Data tahun 2022, di Kabupaten Badung pembentukan dan jenis usaha BUMDes beragam karena Kabupaten Badung sangat identik dengan objek pariwisata dan ekonomi kreatif didalamnya, antara lain; simpan pinjam, pengelolaan sampah, koperasi, pengelolaan air minum, pengelolaan pupuk organik, dan di daerah wisata ada penyewaan perahu, sepeda dan lain-lain untuk wisatawan. Di sini masyarakat yang menyediakan perahu, sepeda untuk disewakan dan dikelola oleh BUMDESA, jadi masyarakat bisa terlibat di dalamnya. Peran BUMDESA dalam bidang ekonomi kreatif terwujud bentuk pemberian bantuan pinjaman modal dengan syarat dan bunga ringan kepada usaha kuliner masakan khas Bali dan usaha kuliner buah-buahan, sehingga usaha kuliner tersebut dapat meningkatkan volume usaha dan menyerap tenaga kerja khususnya ibu-ibu rumah tangga lebih banyak. Begitu juga dengan ekonomi kreatif kerajinan papan surfing dapat meningkatkan volume usaha lebih luas. Untuk kesetaraan gender yaitu BUMDESA berperan menyerap tenaga kerja di desa terutama perempuan sehingga memberikan proporsi yang sama dengan peran laki-laki di desa. Banyak perempuan yang bekerja unit-unit BUMDes bahkan sebagai pengurus BUMDESA sehingga bisa meningkatkan kesetaraan gender

Kata kunci: Kinerja BUMDESA, Ekonomi kreatif, Kesetaraan Gender, Keberlanjutan, pertumbuhan inklusif.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the factors that support and inhibit the development of village-owned enterprises (BUMDESA), the role of BUMDESA in the development of creative economic enterprises and gender equality. This study uses a qualitative analysis technique with a descriptive explanation level, namely an analysis technique that describes qualitative data in the form of the development of BUMDESA, the manifestation of the role of BUMDESA in the development of the creative economy and gender equality as well as the factors that encourage and inhibit BUMDes. The population of this study were all BUMDESAs in coastal village tourism objects in Badung Regency, using the convenience sampling method, so the samples were 4 BUMDESAs that had developed and 6 creative economies in coastal village tourism objects in Badung Regency. Data for 2022, in Badung Regency the formation and types of BUMDes businesses vary because Badung Regency is very synonymous with tourism objects and the creative economy in it, including; savings and loans, waste management, cooperatives, drinking water management, organic fertilizer management, and in tourist areas there are rental boats, bicycles and others for tourists. Here the community provides boats, bicycles for rent and is managed by BUMDESA, so the community can be involved in it. The role of BUMDESA in the creative economy sector is manifested in the form of providing capital loan assistance with conditions and low interest rates for Balinese culinary businesses and fruit culinary businesses, so that these culinary businesses can increase business volume and absorb more labor, especially housewives. Likewise, the creative economy of surfing board crafts can increase business volume more broadly. For gender equality, namely BUMDESA has the role of absorbing labor in the village, especially women so that it provides the same proportion as the role of men in the village. Many women work in BUMDes units and even as BUMDESA administrators so they can improve gender equality.

Keywords: BUMDESA Performance, Creative Economy, Gender Equality, Sustainability, Inclusive Growth

PENDAHULUAN

Pembangunan desa di Indonesia, sejak beberapa tahun belakangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah, baik dari aspek pembangunan fisik maupun non fisik. Pemerintah melakukan kebijakan semacam itu adalah untuk mengatasi ketimpangan antara kota dan desa, maupun memperkecil angka kemiskinan dan kesenjangan sosial baik pendapatan antar populasi dan pendapatan antar daerah (Hadad, 2017).

Di negara sedang berkembang potret buram kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, pendidikan penduduk rendah dan lain-lain, dideskripsikan identik dengan daerah pedesaan pada umumnya. Bagi pemerintah Indonesia justru citra buram itu menjadi fokus perhatian dan hendak dituntaskan saat ini. Dengan dasar hukum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah Indonesia menjalankan amanah secara bertahap dalam mencari solusi masalah tersebut. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan desa (desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan UU- Desa menjadi peluang bagi setiap desa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin luas. Dewasa ini, pembangunan perekonomian di Indonesia difokuskan pada sektor penunjang pembangunan ekonomi Negara. Adapun langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan percepatan pertumbuhan inklusif adalah dengan memberikan landasan yang kuat terhadap kekuatan sendiri dalam pembangunannya dimana pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan inklusif terutama prioritas utama pembangunan di pedesaan di Indonesia (Murthi et al., 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu peran Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan UU Desa dalam rangka memajukan desa. Pengelolaan badan usaha desa ini dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong, dimana institusi dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Bahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong seluruh desa di wilayah pesisir Indonesia untuk mendirikan BUMDes, demi memajukan dan menggerakkan perekonomian desa. Menurut Kemendes PDTT pemberdayaan desa pesisir akan lebih cepat tercapai jika desa pesisir mendirikan dan mengembangkan BUMDes, yang merupakan wadah paling tepat untuk mengelola dan mengembangkan desa dan masyarakat pesisir (Sapa-Indonesia, 2015).

Ekonomi kreatif nampak berkembang sejalan dengan perkembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tujuan wisata yang dipromosikan OECD. Ekonomi kreatif merupakan konsep yang terkait industri kreatif yang menekankan ide kreativitas manusia, sebagai sumber daya ekonomi utama. Hingga saat ini banyak sektor industri yang lahir dari kreatifitas dan inovasi dari setiap individu. Seiring ekonomi kreatif semakin penting maka keterkaitan dan sinergi antara pariwisata dan industri kreatif juga berkembang. Pariwisata juga penting bagi industri kreatif karena berpotensi untuk: (i) mengharumkan aset budaya dan kreatif, (ii) memperluas pemirsa untuk produk kreatif, (iii) mendukung inovasi, (iv) memperbaiki citra negara dan wilayah, (v) membuka pasar ekspor, (vi) mendukung jaringan profesional dan pengembangan pengetahuan (OECD, 2014).

Ekonomi kreatif tumbuh dan berkembang menjadi sektor ekonomi yang memiliki peranan strategis bagi perekonomian. Ekonomi kreatif ini menjadi lebih berperan sesaat nilai tambah sektor tersebut lebih besar, bila dibandingkan dengan PDB Eropa yang bersumber dari industri lain. Kontribusi ekonomi sektor kultural dan kreatif tahun 2003, dari omset di Eropa mencapai € 654 miliar. Nilai tambah bagi ekonomi Eropa secara keseluruhan, sektor ini mewakili 2,6 persen dari PDB Eropa. Pada tahun 2004, minimal 4.714 juta orang bekerja di sektor budaya dan kreatif, setara dengan 2,5 persen populasi pekerja aktif di ke 25 negara Uni Eropa. Di sektor wisata budayasaja dipekerjakan 1.171 juta (CCIs, 2012). Menurut laporan Parlemen Eropa (Tibor Navracics, 2016), industri budaya dan kreatif (CCI) telah menjadi mesin berkapasitas tinggi untuk pertumbuhan ekonomi, yang mewakili 11,2 persen dari semua perusahaan swasta dan 7,5 persen dari semua orang yang dipekerjakan. Sektor seni dan budaya menyumbang sekitar 0,4 persen PDB Inggris dan 0,4 persen GVA di Inggris. Hal ini meningkat menjadi satu persen dari PDB Inggris ketika dampak pengganda tidak langsung dan induksi diperhitungkan dan industri ini diperkirakan mendukung 260.300 pekerjaan atau 1,1 persen dari total lapangan kerja di Inggris. Secara keseluruhan 10 juta wisatawan ke Inggris, sebanyak 32 persen dari semua wisatawan dan 42 persen dari pengeluaran wisatawan melibatkan keterlibatan sektor seni dan budaya yang bernilai £7.6 miliar tahun 2004. Menurut penelitian Murthi et al (2015) pendapatan provinsi Bali masih ditopang oleh daya beli masyarakat yang tinggi dan perilaku konsumtif terhadap suatu produk dagang, sehingga sektor perdagangan tumbuh lebih cepat pada saat pandemi covid 19 perlahan lahan mulai berakhir.

Di Bali sebenarnya pembangunan desa telah dilakukan masyarakat dalam memicu pertumbuhan perekonomian, akan tetapi selalu terbentur dengan permasalahan klasik yakni masih ada masyarakat yang menjunjung

tinggi nilai-nilai kearifan lokal desa yang ada di Bali pada umumnya. Hasil penelitian Suyadnya (2009) mengungkap perempuan Bali tidak hanya mengenal yang namanya peran ganda, tetapi perempuan Bali sejak lama dihadapkan pada peran sosial lain yakni *desa adat* lokal. Pemda. Bali dan Pusat Studi Wanita Universitas Udayana (2005) menunjukkan bahwa peran masyarakat sipil, terutama kegiatan formal seperti pertemuan di desa dan desa tradisional masih didominasi laki-laki. Menurut Mantra (1993), di Bali ada empat masalah mendasar yang membelit wanita Bali sampai sekarang, yakni: terkait masalah pendidikan, mengasuh anak/keluarga, keengganan wanita aktif terlibat kegiatan di luar rumah, terlalu sibuk memprioritaskan masalah materialis. Menurut BPS (2022) kesenjangan gender di Bali muncul dibanyak bidang kehidupan, seperti: pendidikan, pekerjaan, politik, dan lain-lain. Beban ganda yang dipikul perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga, mengakibatkan kemampuan perempuan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya.

Pemaknaan fenomena yang diungkap di atas dapat dijadikan contoh bagi pemangku kepentingan dan kapasitas komunitas desa, untuk lebih kreatif dan inovatif didalam membangun dan mengembangkan diri serta cerdas dalam melihat peluang yang ada yang didasarkan atas potensi lokal yang dimiliki. Peran positif pemangku kepentingan dalam memicu pertumbuhan BUMDes guna pengembangan objek wisata, ekonomi kreatif di desa pesisir, diyakini akan berdampak pada tumbuhnya ekonomi kreatif dalam berbagai jenis diwilayahnya, seperti: wisata pesisir (memancing, menyelam, surfing, kuliner, pasar ikan, pijat, pasar seni, kerajinan lokal, seni tari dan lain-lain). Ekonomi kreatif ini tumbuh atas inisiatif sendiri, dalam bentuk kreasi dan inovasi yang mandiri, sehingga penciptaan lapangan kerja pun tumbuh dengan sendirinya di desa. BUMDes yang dibangun dapat menggali dan mengembangkan potensi desa disamping dapat membuka lapangan kerja. Pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya mawadahi pelaku, aset dan kegiatan dibidang ekonomi. Dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian dan mengoptimalkan aset, agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah melakukan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif terkait pengetahuan bisnis dan manajemen keuangan melalui konferensi, kompetisi, dan jaringan untuk meningkatkan nilai tambah produk dari pelaku ekonomi kreatif. Modal baik dari BUMDes maupun LPD desa tersebut dapat digunakan untuk usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan, pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Murthi et al., 2022).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Apa faktor-faktor yang mendukung pengembangan BUMDes ?. 2) Apa faktor-faktor yang menghambat pengembangan BUMDes ?. 3) bagaimana peran BUMDes terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif. ? dan 4) bagaimana peran BUMDes terhadap kesetaraan gender ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) faktor-faktor yang mendukung pengembangan BUMDes. 2) faktor-faktor yang menghambat pengembangan BUMDes. 3) peran BUMDes terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif. 4) peran BUMDes terhadap kesetaraan gender. Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dalam mengaplikasikan teori ekonomi pembangunan regional, pembangunan pedesaan, pariwisata, kesejahteraan masyarakat, kesetaraan gender dan ekonomi kerakyatan, dengan masalah nyata yang sedang berkembang di masyarakat. Selain itu kegunaan praktis adalah memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, dalam menyusun kebijakan pembangunan objek wisata di desa pesisir. Bagi peneliti lain dalam bidang yang sama, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan bagi unit perpustakaan dapat dijadikan bahan refrensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2009). Penelitian ini memaparkan peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan peranan BUMDes dalam pengembangan kesetaraan gender, serta memaparkan faktor yang mendorong maupun menghambat BUMDes dalam mewujudkan perannya dalam membangun desa di kabupaten Badung. Populasi penelitian ini adalah seluruh BUMDes yang terdapat di objek wisata desa pesisir Kabupaten Badung, dengan menggunakan metode *convenience sampling*, maka yang menjadi sampel adalah 4 BUMDes yang sudah berkembang dan 6 ekonomi kreatif di objek wisata desa pesisir Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tingkat eksplanasi deskriptif yaitu teknik analisis yang memaparkan data kualitatif berupa perkembangan BUMDes, wujud peran BUMDes dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan kesetaraan gender serta faktor yang mendorong maupun menghambat BUMDes dalam mewujudkan perannya dalam pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu peran Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan UU Desa dalam rangka memajukan desa. Pengelolaan badan usaha desa ini dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong, dimana institusi dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Bahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong seluruh desa di wilayah pesisir Indonesia untuk mendirikan BUMDes, demi memajukan dan menggerakkan perekonomian desa. Menurut Kemendes PDTT pemberdayaan desa pesisir akan lebih cepat tercapai jika desa pesisir mendirikan dan mengembangkan BUMDes, yang merupakan wadah paling tepat untuk mengelola dan mengembangkan desa dan masyarakat pesisir (Sapa-Indonesia, 2015).

BUMDes di Indonesia sampai dengan tahun 2021 mencapai 57.200 unit, dan jumlah BUMDes ini jauh meningkat 606 persen jika dibandingkan dengan 2014 lalu, yang hanya 8.100 unit BUMDes (CNN-Indonesia, 2021). Di seluruh Indonesia ada sebanyak 74.910 desa, dan oleh Anwar Sanusi tahun 2017 diakui, dari keseluruhan desa tersebut yang respon dalam mendirikan BUMDes belum mencapai seratus persen. Menurut Anwar Sabusi dari sekian banyak BUMDes yang sudah beroperasi itu, ternyata ada BUMDes yang stagnan atau tidak berkembang, bahkan ada desa yang belum memiliki BUMDes. Dikatakan pula, BUMDes selain berfungsi komersial juga menjalankan fungsi sosial, antara lain melaksanakan kegiatan mengantisipasi bencana alam melalui pelestarian lingkungan wilayah pantai. Seperti pemeliharaan terumbu karang, mangrove, dan lain-lain. Kondisi pantai yang terjaga bisa menjadi potensi wisata pesisir. Kehadiran BUMDes ini selain memberikan nilai tambah bagi anggota, juga mendorong munculnya peluang usaha baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa wisata pesisir (Sapa-Indonesia, 2015).

BUMDes memiliki potensi yang sangat besar untuk mengangkat perekonomian desa di Provinsi Bali, dan selama 2 tahun sejak dibentuk Permendes No. 4 tahun 2015, telah ada 455 BUMDes dan sampai tahun 2022 sudah terdapat 568 BUMDes dari 636 Desa yang tersebar di 9 kabupaten yang ada di Bali. Menurut data masih ada 67 desa yang belum membentuk BUMDes, menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali. BUMDes yang ada bergerak pada usaha sebagai berikut: simpan pinjam 334, toko 90, pengelola pasar 40, pengelolaan sampah 49, penyewaan/jasa 72, air bersih 64, pengelolaan obyek wisata 13, dan lain-lain. Di Kabupaten Badung BUMDes baru dimiliki 37 desa dari 46 Desa yang tercatat sampai dengan tahun 2016, (Denpost, 2018); (Murthi dkk., 2018); (Murthi, 2023). Di Kabupaten Badung pembentukan dan jenis usaha BUMDes beragam, antara lain; simpan pinjam, pengelolaan sampah, koperasi, pengelolaan air minum, pengelolaan pupuk organik, dan di daerah wisata ada penyewaan perahu, sepeda dan lain-lain untuk wisatawan. Di sini masyarakat yang menyediakan perahu, sepeda untuk disewakan dan dikelola oleh BUMDes, jadi masyarakat bisa terlibat di dalamnya.

Tabel 1. Jumlah BUMDes Tiap Kabupaten di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Jumlah BUMDes
1	Buleleng	111
2	Jembrana	41
3	Tabanan	109
4	Badung	46
5	Denpasar	26
6	Gianyar	57
7	Bangli	64
8	Klungkung	43
9	Karangasem	71
Jumlah		716

(Sumber: Data diolah, 2020)

Di Kabupaten Badung sudah semua desa memiliki BUMDes dari 46 Desa yang tercatat sampai dengan tahun 2022, Di Kabupaten Badung pembentukan dan jenis usaha BUMDes beragam karena Kabupaten Badung sangat identik dengan objek pariwisata dan ekonomi kreatif didalamnya, antara lain; simpan pinjam, pengelolaan sampah, koperasi, pengelolaan air minum, pengelolaan pupuk organik, dan di daerah wisata ada penyewaan perahu, sepeda dan lain-lain untuk wisatawan. Di sini masyarakat yang menyediakan perahu, sepeda untuk disewakan dan dikelola oleh BUMDes, jadi masyarakat bisa terlibat di dalamnya. Pemerintah mengeluarkan PP No. 60/2014 tentang Dana Desa, dengan tujuan agar pemerintah desa lebih bisa melayani kebutuhan warga sekaligus warganya lebih aktif berinisiatif. Salah satu wadah untuk memajukan ekonomi desa adalah BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, hal ini

sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes yaitu: 1. Meningkatkan perekonomian desa, 2. Meningkatkan pendapatan asli desa, 3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan 4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Melalui BUMDes diharapkan pembangunan desa dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dapat memfasilitasi berbagai macam kegiatan ekonomi yang kemungkinannya dapat berkembang di desa, seperti di desa pesisir. BUMDes dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi desa, salah satunya melalui kemudahan akses dalam permodalan dengan bentuk pinjaman lunak. Di bidang perikanan sebagai contoh, BUMDes dapat menyediakan perahu dan alat tangkap ikan, sarana pengeringan, gudang penyimpanan, hingga pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bahkan objek wisata pesisir. Dikarenakan peran pemerintah sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di desa (Utomo et al., 2022).

Faktor Yang Mendukung BUMDes Dalam Mewujudkan Perannya Dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Dan Kesetaraan Gender

Suatu lembaga yang mampu mencapai tujuan memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan memberi manfaat sosial kepada kehidupan masyarakat di desa (Murthi et al, 2022).

BUMDes di desa pesisir kabupaten Badung telah menunjukkan perannya dalam pengembangan ekonomi kreatif dan kesetaraan gender. Kemampuan BUMDes dalam mewujudkan perannya bagi pembangunan di desa didorong oleh faktor-faktor yang ada di dalam BUMDes itu sendiri yaitu tersedianya dana dan komitmen dari para pengurus BUMDes untuk bekerja sepenuh hati, mengabdikan demi kemajuan BUMDes dan kemajuan desa pada umumnya. Faktor pendukung kemampuan BUMDes dalam berperan bagi pembangunan desa yang berasal dari luar BUMDes adalah partisipasi masyarakat untuk bertransaksi ke BUMDes seperti meminjam dana dan memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan akan ATK, menyewa kursi, peralatan dan menggunakan jasa lainnya yang disediakan oleh BUMDes.

Faktor Yang Menghambat BUMDes Dalam Mewujudkan Perannya Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Kesetaraan Gender

Pengelola BUMDes di desa pesisir kabupaten Badung melakukan upaya agar BUMDes mampu berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan kesetaraan gender di desa, tetapi dalam pelaksanaan perannya masih ada beberapa hambatan dan masih perlu ditingkatkan lagi. Walaupun partisipasi masyarakat sudah bertransaksi ke BUMDes dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menambah modal usaha, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang meminjam dana ke rentenir.

Minimnya peran BUMDes bagi pembangunan desa diakibatkan oleh rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes dalam mengelola usaha dan mengenali potensi desa, selain itu tidak adanya sinergi antar lembaga keuangan mikro yang ada di desa merupakan faktor penghambat lainnya. Selain BUMDes, di beberapa desa pesisir kabupaten Badung juga memiliki lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan LPD. Para pengurus BUMDes tidak melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pengurus koperasi dan LPD. Tidak terjadinya sinergi antara BUMDes dengan lembaga keuangan mikro menghambat peningkatan kinerja BUMDes. Faktor lainnya yang menghambat BUMDes dalam mewujudkan perannya bagi pembangunan desa adalah rendahnya perhatian dari pemerintah dan dinas terkait serta minimnya perhatian dari Perguruan Tinggi dalam memberikan pelatihan dan pendampingan pengelolaan BUMDes.

Wujud Peran BUMDes Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Objek wisata pesisir dapat berkembang di wilayah sepanjang pantai. Akhir-akhir ini bentuk kreasi industri pariwisata sejenis wisata pesisir banyak mendapat perhatian dan banyak bermunculan, dalam upaya mendiversifikasikan kegiatan ekonomi masyarakat. Objek wisata pesisir ini sebagai bentuk pariwisata massal dan terjangkau bagi hampir semua orang. Bahkan saat ini 65 persen dari para pembuat liburan Eropa lebih memilih pantai (EC., 2011). Perkembangan sektor pariwisata pesisir yang berkualitas nampak semakin kompetitif, dan diharapkan wisatawan harga semakin murah. Pengembangan objek wisata semacam ini pun dapat difasilitasi bahkan dikelola BUMDes.

BUMDes dikelola pemerintahan desa bersama masyarakat dengan kelembagaannya, dan telah memiliki payung hukum UU. Desa Nomor 6, Tahun 2014. Pemberdayaan desa pesisir dan nelayan misalnya, akan lebih cepat tercapai jika desa itu mendirikan dan mengembangkan BUMDes yang merupakan wadah paling tepat untuk mengelola dan mengembangkan desa. (Marwan, 2015).

Kehadiran BUMDes dalam mengembangkan potensi sumberdaya bahari, menjadi kegiatan ekonomi produktif yang bisa menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan, memberikan pinjaman lunak kepada nelayan, menyediakan perahu dan alat tangkap ikan, sarana pengeringan, gudang penyimpanan, kendaraan untuk

transportasi, hingga pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Selain berfungsi komersial BUMDes juga menjalankan fungsi sosial, antara lain melaksanakan kegiatan mengantisipasi bencana alam melalui pelestarian lingkungan wilayah pantai. Seperti pemeliharaan terumbu karang, mangrove, dan lainnya. Kondisi pantai yang terjaga bisa menjadi potensi wisata bahari. Kehadiran BUMDes selain memberikan nilai tambah bagi anggota, juga mendorong muncul peluang usaha baru bagi warga desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes juga bisa mendorong tumbuh kembangnya ekonomi kreatif dari sumber daya bahari yang semua dikerjakan masyarakat setempat. Sedangkan kebutuhan modal usaha, bahan baku, dan peralatannya, disediakan oleh BUMDes dengan pola bagi hasil, sehingga akan memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat dan kas desa. pengembangan seni kriya dari tanaman pandan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia serta BUMDES (Hendriyana et al., 2020).

Ekonomi kreatif yang berbasis budaya tumbuh tidak lepas dari dampak kreatifitas industri pariwisata yang semakin berkembang. Dalam ekonomi kreatif yang terlibat tidak hanya masyarakat atau komunitas sebagai sumber daya yang berkualitas, tetapi juga melibatkan unsur birokrasi dengan pola kewirausahaan. Konsep pelibatan birokrasi dalam ekonomi kreatif adalah bahwa birokrasi tidak hanya membelanjakan tetapi juga menghasilkan dalam arti positif (Osborne dan Gaebler, 1992). Pengembangan ekonomi kreatif yang diutamakan berdasarkan Inpres Nomor 6 tahun 2009 adalah meliputi: periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, design, fashion (mode), film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset.

Di Kabupaten Badung terdapat 46 BUMDes dari 46 Desa yang ada, berarti sudah semua desa di Kabupaten Badung yang memiliki BUMDes khususnya di daerah pesisir Badung yang identik dengan pariwisata dan ekonomi kreatif didalamnya. Di Kabupaten Badung pembentukan dan jenis usaha BUMDes beragam, antara lain; simpan pinjam, pengelolaan sampah, koperasi, pengelolaan air minum, pengelolaan pupuk organik, dan di daerah wisata ada penyewaan perahu, sepeda, paradigling, pementasan pertunjukan kesenian dan lain-lain untuk wisatawan. Di sini masyarakat yang menyediakan perahu, sepeda untuk disewakan dan pertunjukan seni oleh masyarakat lokal sendiri serta dikelola oleh BUMDes, jadi masyarakat bisa terlibat di dalamnya.

Tabel 2 BUMDes Sampel Penelitian

No	Tahun Berdiri	Nama BUMDes	Nama Desa	Bidang Usaha
1	2014	Kutuh	Kutuh	Simpan Pinjam, pengelolaan sampah, distributor, pertunjukan paradigling, barang.
2	2017	Pecatu	Pecatu	Simpan pinjam, Pembayaran Listrik dan Air, Toko modern.
3	2017	Gentha Persada	Tibubeneng	Pemberian Pinjaman, pasar desa, pengelola an sampah.pertunjukan barang dance.
4	2014	Metu Sedana	Cemagi	Simpan Pinjam, Penjualan ATK dan Penyewaan Kursi
5	2015	Triguna Sejahtera	Munggu	Simpan Pinjam, Jasa Penyediaan WIFI, Pengelolaan sampah.

Di Kabupaten Badung Selatan memiliki 36 Objek wisata desa pesisir yakni: Kedonganan, Kuta, Legian, Seminyak, Geger, Pandawa, Jimbaran, Canggu, Batubolong, Payung, Mengening, Seseh, Tanjung Benoa, Tegal Wangi, Green Bowl, Samuh, Mengiat, Dreamland, Nusadua, Waterblow, Padang-Padang, Nyang-Nyang, Berawa, Echo, Jerman, Batubelig, Kelan, Uluwatu, Petitenget, Sawangan, Bias Tugel, Club Med, Melasti, Balangan, Karma Kandara, Kayu Putih. Semua desa di Kabupaten Badung tahun 2022 sudah memiliki BUMDes. Beberapa BUMDes yang menjadi sampel penelitian ini yang ditentukan dengan metode *convinience sampling* disajikan pada Tabel 4.5

Lima Subsektor ekonomi kreatif yang berkembang di Provinsi Bali khususnya banyak berpusat dikabupaten Badung yang berkembang karena sebagai pusat pariwisata di provinsi Bali. 5 subsektor yang besar tersebut antara lain kuliner, fesyen, kriya, penerbitan dan senirupa. Beberapa ekonomi kreatif yang menjadi sampel penelitian ini yang ditentukan dengan metode *convinience sampling* disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 3. Ekonomi kreatif Sampel Penelitian

No	Tahun Berdiri	Nama subsektor ekraf	Bidang usaha
1	2014	Kuliner	Kuliner Ayam Betutu
2	2013	Kuliner	Kuliner Buah-Buahan
3	2011	Fesyen	Garmen
4	2014	Fesyen	Garmen
5	2010	Kriya	Kerajinan tangan
6	2014	Kriya	Kerajinan tangan bamboo

Tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dengan cara mengoptimalkan pengelolaan potensi desa pengembangan ekonomi kreatif desa, dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut BUMDes di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung telah melakukan beberapa usaha agar dapat mewujudkan perannya dalam pengembangan ekonomi kreatif di desa. Hasil wawancara dengan beberapa pengurus BUMDes dan masyarakat desa di beberapa desa pesisir di Badung menyatakan bahwa BUMDes berperan bagi ekonomi kreatif di desa, peran tersebut dapat terlihat pada usaha BUMDes dalam memberikan layanan berupa pinjaman dengan bunga ringan dan syarat yang mudah kepada ekonomi kreatif yang ada di desa baik berupa usaha kuliner, fesyen maupun kriya dan usaha ekonomi lainnya.

BUMDes Kutuh dan Pecatu misalnya yang terdapat di Desa Kutuh memberikan bantuan permodalan kepada kuliner milik Ibu Agas di jalan pantai Pandawa Kutuh, Kuta Selatan dan usaha kuliner buah-buahan milik Pak Nyoman Karsa di labuan Sait, Pecatu Kuta Selatan. Petikan hasil wawancara hari Minggu tanggal 25 November 2020 dengan Ibu Agas sebagai masyarakat desa Kutuh, Kuta Selatan yang memperoleh pelayanan kredit dari Bumdes Desa Kutuh disajikan berikut ini.

“Dengan adanya pinjaman dari Bumdes, saya biasa meningkatkan modal kami dengan bunga yang ringan dan caranya yang gampang, sehingga kami bisa menambah menu makanan disini selain ciri khas betutu dengan adanya modal tambahan dari Bumdes. Sehingga kedepan meningkatkan keuntungan kami”. Petikan wawancara dengan Bapak Nyoman Karsa pemilik usaha kuliner buah-buahan di labuan Sait Pecatu pada hari Minggu tanggal 25 November 2020 disajikan berikut ini. “Dengan adanya tambahan modal usaha dari Bumdes, usaha kami menjadi lebih berkembang dan kami bisa menambah tenaga kerja lokal yakni perempuan atau ibu rumah tangga yang ada didesa pecatu”.

Modal yang diterima usaha kuliner di Desa Kutuh dan Pecatu yang berasal dari pinjaman lunak BUMDes Kutuh membuat usaha tersebut mampu meningkatkan volume usahanya sehingga menyerap tenaga kerja atau memperkerjakan ibu-ibu rumah tangga atau perempuan lebih banyak lagi. Peran BUMDes dalam menunjang usaha industri rumah tangga di desa sejalan dengan pernyataan Fathoni (2006) yang menyatakan bahwa BUMDes berperan dalam menunjang ekonomi kerakyatan. Begitu juga dengan usaha kerajinan tangan (papan surfing) dari hasil wawancara dengan Pak Gusti di daerah Canggu mendapatkan tambahan dana / modal dari BUMDes Metu Sedana di Desa Cemagi. Sehingga Ekonomi Kreatif di Desa dapat terbantu berkembang dengan adanya peran dari masing-masing BUMDes di tiap-tiap Desa. Penelitian ini didukung juga oleh Afwandi (2021), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDes) Kota Pariaman, yakni ditekankan agar BUMDes harus menjadi pilar pengembangan ekonomi kreatif dan sumber PAD Desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hendriatna et al. (2020), dimana dibutuhkan dukungan BUMDes, usaha mikro kecil dan menengah, Dinas Pariwisata beserta *stakeholder* yang berkaitan dengan pariwisata yakni perhimpunan hotel dan restoran dalam pengembangan ekonomi kreatif yaitu kriya dimana menggunakan bahan baku tanaman pandan sebagai produk unggulan di pengandaran, Jawa Barat. Begitu juga di Prambanan dimana BUMDesnya yakni BUMDes kemuda makmur antara berkolaborasi dengan *stakeholder* di bidang pengolahan kayu seperti PT. Sarihusada generasi mahardhika dan PT. Nutricia Indonesia sejahtera dalam menyediakan limbah kayu untuk diolah dan diproduksi secara kreatif serta bernilai ekonomis menjadi palet kayu bersama-sama dengan masyarakat desa (Rosyadi et al., 2019).

Wujud Peran BUMDes dalam Pengembangan Kesetaraan Gender

Agar daya tarik objek wisata tersebut dapat lebih berkembang, menurut Soleha (2015) partisipasi masyarakat lokal sangat penting. Pola seperti itu diyakini membawa dampak positif bagi masyarakat baik dalam perekonomian, sosial, maupun menyadari bahwa melestarikan objek wisata amat penting. Dalam konteks pembangunan daerah dan pariwisata, secara tegas dapat dinyatakan, bahwa pariwisata dapat bertindak sebagai kendaraan untuk pemberdayaan perempuan sambil menyoroti tantangan yang ada yakni kesetaraan gender dalam pariwisata.

Pariwisata memiliki peran penting dalam memberdayakan perempuan secara politis, sosial dan ekonomi. Menyoroti hal seperti ini membuat segala sesuatunya akan menjadi semakin jelas, bahwa ada yang harus dilakukan lebih banyak guna menutupi kesenjangan gender, terutama berkenaan dengan: kepastian kesamaan dalam pengupahan, kesetaraan dalam pekerjaan, dan mengakhiri semua diskriminasi untuk gender. Isu gender masih mendominasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat pedesaan dan kondisi ini berdampak pada kesenjangan manfaat pembangunan daerah. Ketidaksetaraan gender jika masih ada, jelas tidak bermanfaat bagi pembangunan pedesaan berkelanjutan di wilayah wisata pesisir. Mengingat perempuan pedesaan di wilayah tersebut masih dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga komunitasnya.

Kesejahteraan dan revolusi gender hingga kini masih dapat disaksikan perkembangannya di daerah Bali, Indonesia bahkan di negara maju termasuk Uni Eropa. Salah satu ciri dominan proses ini adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam pekerjaan bergaji dan pada saat yang sama perempuan tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Pembagian kerja berdasarkan gender merupakan satu hambatan penting bagi Kesetaraan

Gender, yang ditetapkan melalui kebijakan kesejahteraan pemerintah, mediator pekerjaan dan lingkungan keluarga (Costa, 2014).

BUMDes di desa pesisir Kabupaten Badung selain berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif, juga berperan dalam pengembangan kesetaraan gender. Kehadiran BUMDes Gentha Persada di Desa Tibubeneng, BUMDes Manik Sedana di Desa Kutuh telah membatalkan niat Ibu Made dan Ayu Diksa pergi mencari pekerjaan ke luar desanya. Kehadiran BUMDes Gentha Persada dan Manik Sedana di desa Tibubeneng dan di Desa Kutuh mampu meningkatkan peran perempuan desa untuk bekerja di berbagai unit kerja BUMDes bahkan menjadi pengurus BUMDes sendiri. Petikan hasil wawancara dengan Ibu made pegawai Unit BUMDes disajikan berikut ini

“Tiyang (saya) rencananya mau mencari pekerjaan ke Seminyak, tapi mangkin (sekarang) sudah bekerja di unit BUMDes, karena lebih dekat dengan keluarga tiyang (saya) di desa”. Bukti lain peran BUMDes dalam kesetaraan gender adalah kehadiran BUMDes dalam membuka lapangan pekerjaan dimana Bumdes mengelola berbagai seni pertunjukan di objek wisata di desa, dimana dalam pergelaran seni pertunjukan tari barong ini juga melibatkan para perempuan lokal desa yang berprofesi sebagai penari. Petikan hasil wawancara dengan Made Sukerni, penari di unit BUMDes pesisir pada hari jumat 26 November 2020 disajikan berikut ini.

“Saya dulu belum bekerja karena adanya BUMdes saya bisa bekerja di unit Bumdes yakni pertunjukan Seni Barong Dance sebagai Penari. Disini banyak juga melibatkan perempuan teruna teruni di desa yang bekerja sebagai penari saat pementasan seni tari”. Pemaparan diatas dipekuat dengan pendapat sesuai dengan Purnamasari dan Ma’ruf (2020) bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mawar didesa Kepel melaksanakan prinsip dengan tidak membedakan gender ataupun golongan sehingga seluruh masyarakat yang berminat, bisa mengikuti program dan sosialisasi yang ada tanpa persyaratan yang khusus. Sinergisitas ini membutuhkan sistem pendukung yaitu pemerintah, perguruan tinggi, media, korporasi dan komunitas (Hayati, 2021).

PENUTUP

Simpulan

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu usaha yang dimiliki, dikelola dan didanai oleh pemerintah desa. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu menggali Potensi Desa, menopang pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dan direkomendasikan dari hasil penelitian adalah: 1) Perkembangan BUMDes di Provinsi Bali ditinjau dari BUMDes di Provinsi Bali mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2015 menuju tahun 2022, selama 2 tahun sejak dibentuk Permendesa No. 4 tahun 2015, telah ada 455 BUMDes dan sampai tahun 2022 sudah terdapat 568 BUMDes dari 636 Desa yang tersebar di 9 kabupaten yang ada di Bali. Hampir seluruh desa di Bali memiliki BUMDes. Bahkan untuk Kabupaten Badung sudah seluruh desanya memiliki BUMDes. Data tahun 2022. Di Kabupaten Badung pembentukan dan jenis usaha BUMDes beragam karena Kabupaten Badung sangat identik dengan objek pariwisata dan ekonomi kreatif didalamnya, antara lain; simpan pinjam, pengelolaan sampah, koperasi, pengelolaan air minum, pengelolaan pupuk organik, dan di daerah wisata ada penyewaan perahu, sepeda dan lain-lain untuk wisatawan. Di sini masyarakat yang menyediakan perahu, sepeda untuk disewakan dan dikelola oleh BUMDes, jadi masyarakat bisa terlibat di dalamnya. 2) Peran BUMDes dalam bidang ekonomi kreatif terwujud bentuk pemberian bantuan pinjaman modal dengan syarat dan bunga ringan kepada usaha kuliner masakan khas Bali dan usaha kuliner buah-buahan, sehingga usaha kuliner tersebut dapat meningkatkan volume usaha dan menyerap tenaga kerja khususnya ibu-ibu rumah tangga lebih banyak. Begitu juga dengan ekonomi kreatif kerajinan papan surfing dapat meningkatkan volume usaha lebih luas. 3) Wujud peran BUMDes dalam pengembangan kesetaraan gender yaitu BUMDes berperan menyerap tenaga kerja di desa terutama perempuan sehingga memberikan proporsi yang sama dengan peran laki-laki di desa. Banyak perempuan yang bekerja unit-unit BUMDes bahkan sebagai pengurus BUMDes sehingga bisa meningkatkan kesetaraan gender di Desa tersebut. 4) Faktor yang mendukung BUMDes dalam mewujudkan perannya bagi pembangunan desa adalah tersedianya dana dari pemerintah desa serta dukungan dari masyarakat yang aktif berinteraksi dengan BUMDes. 5) Faktor yang menjadi penyebab masih sedikitnya peran BUMDes adalah rendahnya kemampuan pengurus BUMDes dan pemerintah desa di dalam mengenali potensi yang ada di desa serta kekurangan kemampuan dalam mengelola BUMDes. Selain itu, tidak adanya sinergi antar lembaga keuangan mikro yang ada di desa serta masih kurangnya perhatian pemerintah dan lembaga perguruan tinggi dalam memberikan pelatihan dan pendampingan pengelolaan BUMDes.

Saran

Rekomendasi yang dapat diajukan dengan memperhatikan perkembangan dan peran BUMDes di Desa pesisir Kabupaten Badung yakni 1) Pemerintah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sebaiknya memberikan pelatihan pengelolaan BUMDes agar usaha BUMDes lebih meningkat sehingga lebih mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa. 2) Pengurus BUMDes dan Pemerintah desa hendaknya meningkatkan kemampuan dalam mengenali potensi di desa sehingga lebih meningkatkan diversifikasi usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, (2015). Pemuteran, Kawasan Nelayan Jadi Desa Wisata Internasional, Buleleng-Bali Dalam: *Kompasiana. Com*. Jakarta.
- CNN Indonesia, 2017, BI: *Ekonomi Kreatif Jadi Sumber Pertumbuhan Baru Indonesia*, Jakarta.
- E. Yuningtyas Setyawati, (2011). Pemberdayaan Perempuan Pesisir Melalui Pengembangan Manajemen Komoditas Perekonomian Berbasis Potensi Lokal, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY), *Laporan Penelitian*, Fisipo, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Harmiati, Abdul Aziz, (2016). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- Haryati, Keumala (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Sinergisitas Dengan Bumdes Dan Desa Pintar (*Smart Village*). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Volume 17 No. 3, September 2021, 170-182. DOI: <https://doi.org/10.23960/jbm.v17i3>
- Hendriyana, H., Putra, I. N. D., & Sunarya, Y. yan. (2020). Industri Kreatif Unggulan Produk Kriya Pandan Mendukung Kawasan Ekowisata Pangandaran, Jawa Barat. *Jurnal Pangung*, 20(2).
- Intaratat, Kamolrat (2016). Women Homeworkers in Thailand's Digital Economy. *Journal of International Women's Studies*, 18(1), 87-103.
- Jakarta, Berdesa.com, (2015). Ekonomi Kreatif Desa – berdesa, <http://www.berdesa.com/> ekonomi- kreatif-desa/.
- Jakarta, Kompas.com, (2017). *Inilah Tiga Sektor Ekonomi Kreatif yang Sedang Naik Daun - Kompas*, <https://ekonomi.kompas.com> > Ekonomi > Bisnis.
- Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung (2015). *Renstra*, [https:// badungkab.go. id/assets/ CKImages/ files/ Renstra.pdf](https://badungkab.go.id/assets/CKImages/files/Renstra.pdf).
- Kompasiana, (2017). *Di Indonesia, Kesetaraan Gender Masih Belum Sepenuhnya Tercapai*, <https://www.kompasiana.com/kompasiananews/di-indonesia-kesetaraan-gender-masih-belum-sepenuhnya>
- Mangupura, Antara-Bali (2017). *Diskop Badung Dorong Sinergi UMKM-BUMDes*, Pewarta: Pewarta: I Made Surya, Editor: Edy M Yakub.
- Mantra, R. (2017). *Denpasar Fokus Kembangkan 4 Bidang Ekonomi Kreatif*, Dalam: Kabar 24, Co, Denpasar-Bali.
- Marwan (2015). *Kemendes Pdtt Dorong Desa Pesisir Dirikan Bumdes*, www.sapa.or.id /b1 /132 -pmk/ 7424-bumdes-0107.
- Marta, I. N.G., Murthi, N. W., dan Suarbawa, I.W. (2020). Keterbukaan impor dalam Perekonomian Bali, *Majalah ilmiah Untab*, 17(1), 76-80.
- Marta, I. N.G., Murthi, N. W., dan Terimajaya, I.W. (2021). Analisis Jangka Panjang Keterbukaan impor Perekonomian Bali, *Majalah ilmiah Untab*, 18(2), 261-266.
- Murthi, N. W., Made K, Sri B, Ida B. P, (2015). Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Perilaku Konsumtif, Basis Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. *EJurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 4 No. 12, pp: 10011048.
- Murthi, N. W., Utama, M. S., Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. (2022). The Effect of Several Factors on Inclusive Growth in the Coastal Village–Badung. *Central European Management Journal*, 30(4), 1371–1383. 10.57030/23364890.cemj.30.4.138.
- Murthi, N. W., Utama, M. S., Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. A. I. N. (2022). Government role, BUMDes performance on inclusive growth in coastal village, Badung Regency. *International Journal of Health Sciences*, 6(S5), 8879–8890. 10.53730/ijhs.v6nS5.11797.
- Murthi, N.W., Wiratmaja, I.B.N., dan Aryawan, I.M.G. (2018). Pengaruh modal, tenaga kerja dan lama usaha terhadap pendapatan peternak ayam petelur di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, *Majalah ilmiah Untab*, 15(2), 172-177.
- Murthi, N.W (2023). Analisis pendapatan pedagang di pasar kediri kecamatan kediri Kabupaten Tabanan di Tinjau dari faktor internal, *Jurnal Ganec Swara Vol. 17, No 2, Juni 2023*.
- Purnamasari, S. D., dan Ma'ruf, M. F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Bumdes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk). *Publika*, Vol 8 No 5, 1-12, <https://doi.org/10.26740/publika.v8n5.p%25p>.
- OECD, (2014). *Tourism and Economy Creative Study*, OECD Studies on Tourism, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264207875-en>.
- Riset Ekonomi Kreatif, (2015). *Creative Economy Research*, North Caroline arts Council.

- Rosyadi, S., Haryanto, A., Kusuma, A. S., & Fitrah, E. (2019). The Role of Creative Economy in Promoting Sustainable Rural Development. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- Sapa-Indonesia, (2015). Kemendes PD TT Dorong Desa Pesisir Dirikan Bumdes, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PD TT), Dalam: Sapa-Indonesia.
- Social Watch, (2005). *No Country Treats its Women the same as its Men: the Gender Equality Index – a New Perspective, in Social Watch Roars and Whispers: Gender and Poverty: Promises Versus Action*, Montevideo: Social Watch http://www.socialwatch.org/en/informeImpreso/pdfs/gei2005_eng.pdf.
- Suardana, 2010, Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Kuta sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pariwisata Bali, *Jurnal Piramida*, Vol.6 No.2, Universitas Udayana.
- Suarthana, I Wayan, (2018). Angkat Perekonomian Desa, Bumdes Jangan Hanya Fokus Di Simpan Pinjam, Dalam: Bali Post, Denpasar.
- Sukardja, P. (2012). *Perempuan Sukarara memenun modal budaya perjuangan mencari kesetaraan gender*. Denpasar: Udayana University Press.
- Susenas – BPS Provinsi Bali (2016). Gender , <https://bali.bps.go.id/subject/40/gender.html>
- Tran, L. and Walter, P. (2014). Ecotourism, Gender and Development in Northern Vietnam. *Annals of Tourism Research*, 44, 116-130.
- Tribun-Bali.Com, Denpasar. (2015). Kesetaraan Gender Bisa Dimulai dari Desa, Denpasar.
- UNDP-PBB, (2000). Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam SDGs, Dalam: *Pemikiran Komunikasi*, [https:// safutrarantona.wordpress.com/2016/11/06/](https://safutrarantona.wordpress.com/2016/11/06/).
- UNCTAD, (United Nations Conference On Trade And Development), (2008). *Creative Economy Report 2008*, Unctad/Ditc/2008/2, Isbn 978-0-9816619.
- UNWTO, (2012). *Gender and Tourism*, Regional Seminar on Responsible Tourism: Opportunities for Women and Youth (Nigeria, June 2012), Calabar – Nigeria.
- USAID. (U.S. Agency for International Development), (2012). *Gender Equality And Women's Empowerment, From The American People*, <https://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment>.
- Utama Suyana, I M. (2018). Prospek Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Provinsi Bali dari Perspektif Kelembagaan. *Artikel Pada Buku Bunga Rampai Strategi Pemberdayaan UMKM Bali*. Denpasar: Fakultas Ekonomi & Bisnis. Universitas Udayana.
- Wibowo, H. (2018). *pengembangan ekonomi kreatif melalui BUMDes menuju koperasi berbasis IT*, Skripsi, Jurusan ekonomi, Fakultas ekonomi SEBI, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam.